



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGHUKUMAN KEBIRI
(Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak)

TESIS

M. KHOIRI
NPM. 1510922021

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2018



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGHUKUMAN KEBIRI
(Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum

M. KHOIRI

NPM. 1510922021

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL“VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : M. Khoiri
NRP : 1510922021
Tanggal : 07 Juli 2018

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 07 Juli 2018

Yang Menyatakan



M. Khoiri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : M. Khoiri
NRP : 1510922015
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti non eksklusif (*Non-Eksklusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Kebijakan Hukum Pidana Penghukuman Kebiri (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tesisnya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Peryataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 07 Juli 2018

Yang Menyatakan



M. Khoiri

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : M. Khoiri

NPM : 1510922021

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGHUKUMAN KEBIRI
(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



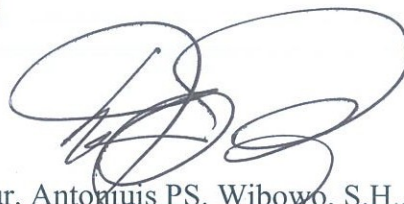
Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ketua Penguji



Dwi Desi Yanti Tarina, S.H., M.H.
Atas Nama Penguji/ Pembimbing I



Dwi Desi Yanti Tarina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Iur. Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H.
Penguji/ Pembimbing II



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 07 Juli 2018

**Kebijakan HUKUM PIDANA PENGHUKUMAN KEBIRI
(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak)**

M. KHOIRI

Abstrak

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, secara substansi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memicu kontroversi khususnya sanksi pidana berupa pidana mati dan sanksi tambahan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibutuhkan kebijakan hukum yang baik sehingga kebijakan dapat diberlakukan dan penerapan hukuman yang tepat bagi seseorang yang dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan pidana dalam hal ini upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan hukuman kebiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dengan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis. Sebagai pisau analisis Penulis juga menggunakan teori negara hukum, teori kebijakan hukum, dan teori tujuan pemidanaan. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi tersebut inkonstitusional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan hasilratifikasi ICCPR dan CAT dimana didalamnya ada ketentuan-ketentuan salah satu pasalnya mengenai hak asasi manusia dilanggar.

Kata kunci: Hukuman Kebiri, Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016.

THE POLICY OF CURRENT PENALTY CRIMINAL LAW
*(Juridical Analysis of Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of
Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second
Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection)*

M. KHOIRI

Abstract

The issuance of Law Number 17 of 2016 concerning Ratification of Perppu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Child Protection Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in substance Perppu Number 1 of 2016 triggering controversy especially criminal sanctions in the form of capital punishment and additional sanctions. Efforts to prevent and overcome crime requires a good legal policy so that policies can be applied and the application of appropriate penalties for someone who is blamed or accountable for committing a criminal act in this case efforts to prevent and overcome sexual violence against children and the punishment of castration. In this study the author uses a method with a type of normative research using a juridical approach. As a knife for analysis, the author also uses the state of law theory, legal policy theory, and the theory of criminal objectives. The result of this study is that Law Number 17 of 2016 which applies the weighting of punishment for perpetrators of sexual violence by imposing chemical castration is unconstitutional in contravention of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the results of the ICCPR and CAT ratification in which there are provisions of one article concerning human rights violated.

Keywords: Castration Punishment, Child Protection, Law No. 17 of 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada sang Khaliq sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa shalawat beserta salam dicurahkan kepada baginda Rasul SAW, yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh akan teknologi seperti dirasakan saat ini.

Penulis dalam penelitian ini membahas mengenai **“Kebijakan Hukum Pidana Penghukuman Kebiri** “(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. yang dilaksanakan sejak Mei 2017.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj, M.Sc., Eng., Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N., Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Pembimbing I Bapak Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum., dan Pembimbing II Bapak Dr. IUR Antonius PS Wibowo., S.H., M.H. yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan;
5. Para Penguji dan Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah mentransfer ilmunya semoga menjadi amal jariyah kelak;
6. Staf/Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah membantu melancarkan dan melayani penulis dengan rasa tulus ikhlas;
7. Istri dan anakku tercinta Ainurrida Fathhul Jannah, SST., Keb. Dan Harun Al Rosyid yang selalu menjadi semangat dan motivasi bagi penulis;

8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Djuri (Alm), Ibunda Muntamah dan Ayahanda Munasan, S.Ag. (mertua), Ibunda Mubaiyinah, Amd. Keb. (mertua), yang selalu memberikan nasehat dan menjadi inspirator bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
9. Kepada Saudara-saudaraku Mbak Siti Mu'arofah, Mas Muhajir, S.H., M.H., Mbak Siti Mutaaminah, Adikku Muhammad Mu'alimin, S.H., Muhammad Irwansyah, S.H. dan seluruh familiku yang penulis banggakan.
10. Salam tahdzim disampaikan pula untuk Bapak H. Wahyu Sanjaya, SE. Anggota DPR RI yang telah mensupport juga menjadi panutan dan guru terbaik bagi penulis;
11. Kepada semua teman-teman, teman seperjuangan di UPN Veteran Jakarta, terima kasih atas semua bantuan baik secara moril dan materil untuk penulis serta semua pihak yang telah membantu dan mengantarkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Terakhir kritik dan saran sangat penulis tunggu untuk kesempurnaan tulisan ini, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, dunia akademik dan khalayak pada umumnya.

Jakarta, 07 Juli 2018



M. Khoiri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian	5
I.4. Kegunaan Penelitian	5
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	5
I.6. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pemahaman Kebijakan Hukum Pidana	16
II.2. Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual dalam KUHP	20
II.3. Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHP	27
II.4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak-Hak Anak.....	31
II.5. Penghukuman Kebiri Perspektif Hak Asasi Manusia.....	34
II.6. Penghukuman Kebiri Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.....	47
II.7. Pelaksanaan Penghukuman Kebiri Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Beberapa Negara.....	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
III.1. Jenis Penelitian.....	57
III.2. Pendekatan Penelitian	60
III.3. Sumber Bahan Hukum	61
III.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	67
III.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	67
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	
IV.1. Urgensitas Penghukuman Kebiri di Indonesia Perspektif Kebijakan Hukum dan HAM	69
IV.2. Kedudukan Lembaga Pelaksana Hukuman Kebiri	80
BAB V PENUTUP	
V.1. Simpulan	89
V.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
RIWAYAT HIDUP.....	94